

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam pelayanan administrasi pembuat kartu pencari kerja.

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pelayanan administrasi pencari kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelayanan administrasi pencari kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan.
2. Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator seperti sederhana, transparan, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau.
3. Masih belum adanya Transparansi dalam Administrasi Pembuatan Kartu Pencari Kerja Khususnya pada hal persyaratan dan tata cara yang belum jelas sehingga menyulitkan sebagian masyarakat yang belum mengetahui dan memenuhi persyaratan pembuatan kartu pencari kerja. Serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan.

4. Kelengkapan fasilitas fisik yang dimiliki belum memadai khususnya pada ruang tunggu para Pembuat Kartu Pencari Kerja pada Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan.
5. Dari hasil rekapitulasi jawaban responden dapat disimpulkan bahwa bagaimana Pelayanan Administrasi Pendaftaran Pencari Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan dalam kategori cukup atau kurang maksimal dengan nilai persentase rata-rata sebesar 57,71%.

6.2. Saran

Adapun saran penulis mengenai bagaimana pelayanan administrasi pencari kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan adalah sebagai berikut :

1. Aparatur yang bertugas dalam melayani masyarakat pembuat kartu pencari kerja harus memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dalam menerima pelayanan yang diberikan oleh pihak yang terkait.
2. Pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, harus mulai menerapkan program pembuatan Kartu pencari kerja secara online sehingga masyarakat tidak harus datang dan lebih mengoptimalkan pelayanan administrasi pencari kerja.
3. Perlu adanya penambahan pegawai yang mengerti dalam bidang administrasi ataupun pegawai yang sesuai dengan yang diharapkan dalam menangani Pelayanan Administrasi Pendaftaran Pencari Kerja

terutama pada saat-saat dibukanya lowongan pekerjaan baik dipemerintahan maupun swasta.

4. Perlu adanya penerapan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti dalam hal sistem Pembuatan Kartu Pencari Kerja, sesuai dengan Keputusan Bupati Pasal 12 No. 272 Tahun 2004 bahwa seseorang pendaftar pencari kerja minimal berumur 17 tahun harus datang langsung tanpa diwakili oleh orang lain serta diwawancarai langsung oleh pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk mengetahui minat dan bakat yang dimiliki oleh seseorang Pencari Kerja tetapi, pada aplikasinya belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dari Kepala Dinas Sosial dan tenaga Kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah.
5. Pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja harus lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pembuat kartu pencari kerja dalam segala hal, karena masyarakat butuh kenyamanan dalam setiap urusan yang ada. Pemerintah harus meningkatkan pelayanan dalam mewujudkan pelayanan prima dan perlu adanya pengawasan yang lebih maksimal dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terhadap para pegawainya.